

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam adalah agama yang selalu mengajarkan kebaikan dalam segala aspek kehidupan sebagai agama yang *rahmatan lil ‘alamin* merupakan suatu harapan yang digunakan dalam pencapaian kemaslahatan hidup baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Hal ini, tidak terkecuali dalam aspek ekonomi.

Dalam aspek ekonomi kehidupan bermasyarakat atau bermuamalah tidak akan lepas dari berinteraksi dengan orang lain, karena manusia adalah makhluk sosial yang diharuskan untuk menjalani hubungan dengan saudara, tetangga dan lainnya. Selain itu ada kewajiban juga yaitu berinteraksi dengan Tuhan-Nya. Ini yang harus didominasi dalam menyelaraskan antara hubungan dengan manusia. Allah SWT tidak akan semata-mata mengabulkan do'a hamba-Nya jika hamba-Nya tidak berlaku baik dengan sesamanya.

Ibadah adalah *tauifiyah*, artinya tidak ada suatu bentuk ibadah pun yang disyariatkan kecuali berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah.¹ *Hablum minallah* adalah suatu peribadahan yang dilakukan antara hamba dengan Tuhan-Nya atau bisa disebut juga *Ibadah Mahdhah*. Diantara *ibadah mahdhah* ini adalah mendirikan shalat, membayar zakat, melaksanakan puasa, sedangkan *hablu minannas* adalah peribadatan yang dilakukan antara hamba dengan hamba yang

¹ Syahrul Anwar, *Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), hlm, 61.

lainnya (*ibadah Ghairu mahdhah*) *ibadah ghairu mahdhah* adalah bermuamalah, shadaqah, waqaf, dan ibadah lainnya yang mengatur hubungan antara manusia dengan manusia lainnya yang sasarnya harta, benda atau mal.

Didirikannya koperasi secara syariah pada dasarnya maksud yang sama yaitu dilatar belakangi oleh keinginan umat islam untuk menghindari riba. Di dalam undang –undang dasar 1945 pasal 33 ayat 1 menyatakan bahwa “perekonomian indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan”. Pasal ini menjelaskan bahwa kemakmuran masyarakat sangat diutamakan dan berbentuk usaha yang tepat adalah koperasi yang didasarkan atas asas gotong royong, yang artinya bahwa peranan masyarakat maupun lembaga masyarakat harus tetap dilibatkan. Atas dasar pertimbangan itu maka disahkan undang - undang RI Nomor 25 tahun 1992 pada 12 oktober 1992 tentang perkoprasian oleh presiden suharto yang menyatakan bahwa :

“Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum. Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan keberadaan koperasi ini mampu membantu dan mengangkat perekonomian masyarakat menengah kebawah”.²

Menurut Moh. Hatta yang dikenal sebagai Bapak Koperasi Indonesia beliau mengatakan, “Koperasi adalah Badan usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong-menolong. Semangat tolong-

² Nur S. Buchori, Koperasi Syariah Teori dan Praktik, Jakarta : Afa Media, 2012, hlm.

menolong tersebut didorong oleh keinginan memberi jasa kepada kawan berdasarkan ‘seorang buat semua dan semua buat seorang’.³

Pertumbuhan badan usaha koperasi saat ini telah mengalami peningkatan yang luar biasa. Baik itu koperasi yang menggunakan sistem konvensional maupun syariah yang sudah dapat dijumpai hampir di setiap daerah di Indonesia. Tingkat persaingan yang tinggi dalam memperebutkan sasaran pasar yang sama serta kebutuhan masyarakat yang semakin beragam dari waktu ke waktu mengakibatkan banyaknya perusahaan koperasi yang gagal bersaing kemudian gulung tikar. Inilah salah satu tantangan yang harus dihadapi oleh badan usaha koperasi, bagaimana caranya untuk menarik minat masyarakat agar mau bergabung ke dalam keanggotaan kekoprasian agar jumlah anggota koperasi meningkat.

Adapun kegiatan koperasi syariah melakukan penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat guna membiayai investasi perusahaan, sistem koperasi syariah adalah sistem bagi hasil (*revenue sharing*) yang berorientasi pada kemitraan untuk mencapai kemaslahatan bersama.

Baitul maal wat tamwil adalah lembaga keuangan non bank dengan konsep syariah yang lahir sebagai pilihan yang menggabungkan konsep *maal* dan *tamwil* dalam satu kegiatan lembaga.⁴ BMT merupakan lembaga yang memiliki dua peran sekaligus yakni peran sosial yang terlihat pada arti *baitul maal* dan peran bisnis yang terlihat dari arti *baitul tamwil*. Selain itu BMT juga bisa menerima

³ Arifin sitio dan Halomoan Tamba, *Koperasi: teori dan praktek*, Jakarta: Erlangga, 2001, hal.17.

⁴ Novita dewi masyitoh. *Analisis normatif undang-undang no 1 tahun 2013 tentang lembaga keuangan mikro (LKM) atas status badan hukum dan pengawasan baitul maal wat tamwil (BMT)*. (jurnal :oktober 2014), hlm.18.

titipan zakat, infaq, shadaqah, waqaf dan sumber-sumber dana sosial lainnya, serta upaya penyaluran zakat kepada golongan yang paling berhak.⁵

Koperasi syariah BMT Itqan merupakan salah satu koperasi di Indonesia yang berbasis syariah, dengan jenis usaha yang dikembangkan dengan harapan dapat mengangkat perekonomian (*baitu tamwil*) sekaligus juga dapat mendayagunakan dana sosial zakat, infaq, shodaqah dan waqaf untuk kepentingan kaum dhuafa. Pemberdayaan kaum dhuafa merupakan misi utama bmt itQan, sejalan dengan hadist Nabi Muhammad SAW : “*khairunnas ‘anfahum linnas*” yang berarti sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak manfaatnya untuk manusia lainnya. Dan juga bertujuan untuk meningkatkan semangat dan peran serta masyarakat dalam berkoperasi syariah dan meningkatkan pemberdayaan masyarakat ekonomi lemah dengan program simpanan, pembiayaan, solidaritas/taawun dan jasa keuangan lainnya.⁶

Bmt itQan adalah koperasi syariah bmt itqan sesuai dengan akta pendirian yang telah disahkan oleh dinas koperasi dengan nomor badan hukum BH518/BH.32/DISKOP/2007.⁷ Dalam menjalankan oprasionalnya bmt itQan telah menggunakan sistem seperti pada perbankan sehingga lebih efektif dan cepat dalam pelayanan. Untuk mengatasi persaingan dan menarik minat masyarakat, Koperasi syariah bmt ItQan menawarkan berbagai macam produk untuk memenuhi kebutuhan anggotanya, salah satu yang banyak diminati adalah Produk simpanan berjangka *mudharabah*.

⁵ Muhammad Ridwan, Manajemen Baitul Maal wa Tamwil, Yogyakarta: UII Press, 2014) hal. 126

⁶ <http://bmtitqan.org/profil/detail/1/visi-misi-dan-tujuan.html> diakses pada jumat 5 oktober 2018 jam 19:09 wib.

⁷ POLJAK KSPPS itQan Padasuka Bandung 2018

Simpanan berjangka (deposito) adalah sejenis jasa tabungan yang memiliki jangka waktu dimana uang di dalamnya tidak dapat diambil sebelum jatuh tempo sesuai kontrak penempatannya.⁸

Pengertian deposito *mudharabah* menurut para ahli antara lain: Menurut Muhammd Syafi'i Antonio dan Kamen Perataatmadja, Deposito *Mudharabah* adalah simpanan pihak ke tiga (perorangan atau badan hukum) yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu dengan mendapatkan imbalan bagi hasil berdasarkan kesepakatan bersama.⁹ Menurut ismail: Deposito *Mudharabah* merupakan dana investasi yang ditempatkan oleh nasabah yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu, sesuai dengan akad perjanjian yang dilakukan antara bank dan nasabah investor.¹⁰

Akad *mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.¹¹

Penggunaan akad *mudharabah* di koperasi syariah bmt itQan pada produk simpanan berjangka ini adalah akad *mudharabah mutlaqah* yaitu bentuk kerja

⁸ Ali suryanto herli, *Buku Pintar Pengelolaan BPR dan Lembaga Keuangan Pembiayaan Mikro*, Yogyakarta: CV. ANDI, 2013, hlm.19.

⁹ Muhammad Syafi'i Antonio. *Bank Syariah Dari teori Ke praktek*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001, hlm.20.

¹⁰ Ismail, *Perbankan Syariah* Jakarta: Kencana, 2011, hlm.91.

¹¹ Muhammad Syafi'i Antonio. *Bank Syariah Dari teori Ke praktek*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001, hlm.95.

sama antara *shahibul maal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Dalam pembahasan fiqh ulama salafus shaleh seringkali dicontohkan dengan ungkapan *if al ma syi'ta* (lakukanlah sesukamu) dari *shahibul maal* ke *mudharib* yang memberi kekuasaan sangat besar.¹² maka koperasi syariah bmt itQan sebagai *mudharib* (pengelola dana) mempunyai kebebasan untuk mengelola dana tersebut, dengan jangka waktu dan bagi hasil yang telah disepakati bersama.

Koperasi Syariah Bmt ItQan padasuka bandung pada produk simpanan berjangka (SIJAKA) itu dalam menentukan nisbah bagi hasilnya salah satunya dengan menggunakan sistem perhitungan *equivalen rate* dimana *equivalen rate* ini dipilih sebagai variabel independen yang mencerminkan tingkat bagi nhasil tabungan dan deposito yang di terapkan di bmt itqan. *Equivalen rate* dipakai untuk mempermudah proses perhitungan akan tetapi *equivalen rate* cenderung berfluktuatif sesuai dengan pergerakan pendapatan Bank syariah atau lembaga-lembaga keuangan syariah lainnya termasuk BMT. Metode *equivalen rate* adalah metode perhitungan bagi hasil untuk nasabah dengan cara mengonversi bagi hasil untuk seluruh nasabah pada masing-masing produk dana pihak ketiga kedalam bentuk presentase (*equivalen rate*).¹³

Jika dana yang mengendap di bmt cukup lama maka simpanan berjangka (deposito) memiliki nisbah bagi hasil yang cenderung lebih tinggi dibanding dengan tabungan biasa. Karena pada prinsipnya, semakin panjang jangka waktu

¹² Muhammad Syafi'i Antonio. *Bank Syariah Dari teori Ke praktek*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001, hlm,97.

¹³ Adiwarman A Karim, *Bank Islam Analisis dan Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010) hlm, 405.

dana yang mengendap di bmt maka semakin luas kesempatan yang dimiliki bmt untuk memanfaatkan dana tersebut. Simpanan berjangka (deposito) juga merupakan dana terkendali, artinya pihak bmt mengetahui secara pasti jangka waktu mengendapnya dana. Dari sisi ini maka tentu saja pihak BMT akan memanfaatkan dana tersebut sesuai dengan jangka waktunya.

Misalnya dengan jangka waktu 3 bulan nisbah anggota 14% dan equivalen ratenya 7,5%, 6 bulan nisbah anggota 16% dan equivalen ratenya 8,5%, 12 bulan nisbah anggota 18% dan equivalen ratenya 10% , 24 bulan nisbah anggota 20% dan equivalen ratenya 12%.

Mengacu pada hal-hal diatas, dengan melihat sistem perhitungan bagi hasil yang digunakan dalam produk simpanan berjangka (SIJAKA) di KSPPS BMT ItQan padasuka bandung, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam penyusunan skripsi dengan judul “PELAKSANAAN BAGI HASIL PRODUK SIMPANAN BERJANGKA DENGAN AKAD *MUDHARABAH* DI KSPPS BMT ITQAN PADASUKA BANDUNG”

B. Rumusan Masalah

Koperasi Syariah BMT ItQan padasuka bandung dalam menetapkan nisbah pada produk simpanan berjangka dengan akad *mudharabah mutlaqah* terdapat *equivalen rate*, yang menggunakan presentase dimana presentase *equivalen rate* tersebut tidak ada dalam teori akad *mudharabah*. Sedangkan teori *mudharabah* tidak tergantung pada *equivalen rate*, tetapi tergantung pada keuntungan BMT tersebut.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam penulisan penelitian ini adalah:

1. Bagaimana latar belakang KSPPS BMT ItQan dalam menggunakan sistem perhitungan *equivalen rate* pada produk sijaka?
2. Bagaimana proses pelaksanaan produk sijaka di KSPPS BMT ItQan Padasuka Bandung?
3. Bagaimana penggunaan *equivalen rate* pada produk sijaka menurut Fatwa DSN dan PBI di KSPPS BMT Itqn Padasuka Bandung?

C. Tujuan dan Manfaat

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui latar belakang KSPPS BMT itQan dalam menggunakan sistem perhitungan *equivalen rate* pada produk sijaka.
2. Untuk mengetahui proses pelaksanaan produk sijaka di KSPPS BMT Itqan Padasuka Bandung.
3. Untuk mengetahui penggunaan *equivalen rate* pada produk sijaka menurut Fatwa DSN dan PBI di KSPPS BMT Itqn Padasuka Bandung.

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi penulis

Dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang salah satu produk di KSPPS BMT Itqan padasuka bandung terutama simpanan berjangka.

2. Bagi KSPPS BMT Itqan Bandung

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi KSPPS BMT Itqan Bandung dalam menjalankan oprasionalnya.

3. Bagi UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan ilmu pengetahuan bagi akademisi mengenai strategi pemasaran produk keuangan syariah, khususnya produk simpanan berjangka pada KSPPS BMT Itqan Bandung.

4. Bagi Masyarakat

Sebagai informasi bagi masyarakat tentang produk Sijaka (simpanan berjangka) pada KSPPS BMT Itqan Padasuka Bandung.

D. Studi Terdahulu

Selama ini pembahasan tentang pengelolaan simpanan berjangka sebuah produk deposito pada perusahaan jasa keuangan telah banyak dibahas dalam berbagai karya baik berupa makalah, tugas akhir, skripsi, tesis, atau buku-buku baik sebagai judul khusus maupun sebagai sub judul. Dan untuk mendukung permasalahan yang lebih relevan dan mendalam terhadap bahasa diatas, penyusun berusaha mencari berbagai literatur dan penelitian terdahulu (*prior risearch*) yang masih relevan terhadap masalah yang menjadi obyek penelitian ini.

1. Penelitian yang dilakukan oleh saudara Mamin, NIM 1209302083 yang berjudul PENETUAN NISBAH BAGI HASIL DALAM PRODUK DEPOSITO IB MASLAHAH DI BANK BJB SYARIAH KANTOR CABANG PEMBANTU SUMEDANG, yang bertujuan untuk mengetahui penentuan nisbah bagi hasil pada produk deposito tersebut.

2. Penelitian yang dilakukan saudara Lukman Jamaludin, NIM 207300857

Yang berjudul SIMPANAN BERJANGKA BAROKAH PADA BMT AL-AMANAH SITURAJA SUMEDANG, yang bertujuan untuk mengetahui strategi pemasaran dan jumlah saldo dari hasil produk siberkah.

Peneliti menyadari bahwa penelitian ini bukanlah yang pertama dilakukan, namun dengan memposisikan penelitian-penelitian di atas sebagai sebuah referensi, memberikan peluang bagi peneliti untuk meneliti tema yang sama dengan mengambil fokus permasalahan yang berbeda.

E. Kerangka Pemikiran

Mudharabah merupakan hasil kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak yang lainnya menjadi pengelola (*mudharib*). Dengan demikian dalam kapasitasnya sebagai *mudharib* memiliki sifat sebagai seorang wali amanah (trustee). Yakni harus berhati-hati atau bijaksana serta beritikad baik dan bertanggung jawab atas segala sesuatu yang timbul akibat kesalahan kelalaiannya.¹⁴

Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Sedangkan apabila terjadi kerugian ditanggung oleh

¹⁴ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 203.

pemilik modal, selama kerugian itu bukan akibat dari kelalaian pengelola dan pengusaha tidak berhak atas upah usahanya.¹⁵

Dalam kegiatan penghimpunan dana lembaga keuangan syariah, prinsip *mudharabah* dapat diterapkan untuk pembukaan rekening tabungan deposito (tabungan *mudharabah* dan *deposito mudharabah*) adapun yang menjadi landasan syariah *mudharabah* secara umum seperti tercantum dalam firman Allah QS. Al-Baqarah ayat 283:

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَيْنَ مَقْبُوضَةً ۖ فَإِنْ أَثِمَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ ۖ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۚ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۚ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۝۲۸۳ ﴾

Artinya: “jika kamu dalam perjalanan (dalam bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) hendaklah ia bertakwa kepada Allah tuhan; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (Q.S. al-Baqarah: 283).¹⁶

Begitu pula dalam sebuah hadis nabi yang menerangkan *mudharabah* yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Bahwasannya Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَيْعُ إِلَى أَخْلِ وَالْمَقَا رَضَةٌ وَأَخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه عن صهيب)

¹⁵ M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah Dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Loguga Pustaka, 2009), hlm. 101.

¹⁶ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: P.T. Sygma Examedia Arkanleema, 2009), hlm. 49.

Artinya: Dari shalih bin shuhaib r.a bahwa rosulullah SAW bersabda “Tiga perkara yang mengandung berkah adalah jual beli yang ditangguhkan, melakukan qiradh (memberi modal kepada orang lain), dan yang mencampurkan gandum dengan tepung untuk keluarga, bukan untuk diperjualbelikan”. (HR. Ibnu Majah Dari Shuhaib).¹⁷

Mudharabah menurut bahasa diambil dari bahasa arab yaitu dharb, maksudnya Adharbu fil ardi yaitu bepergian untuk berurusan dagang sebagaimana disebutkan dalam QS. al-Nisa ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya allah adalah maha penyayang kepadamu.” (Q.S An-Nisa: 29).¹⁸

Berdasarkan ijma yang diriwayatkan sejumlah sahabat menyerahkan (kepada orang *mudharib*) harta anak yatim sebagai *mudharabah* dan tak ada seorangpun mengingkari mereka karenanya, hal itu dipandang sebagai ijma, adapun Qiyas transaksi *mudharabah* diqiyaskan kepada transaksi musaqah, dalam kaidah fiqh *mudharabah* yang artinya:

الْأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

¹⁷ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 96.

¹⁸ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: P.T. Sygma Examedia Arkanleema, 2009), hlm. 83.

“pada dasarnya, semua bentuk *muamalah* boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”¹⁹

Dalama literatur fiqih, *mudharabah* berbentuk perjanjian kepercayaan (*uqud al-amanah*) yang menuntut tingkat kejujuran untuk kepentingan bersama dan setiap usaha dari masing-masing pihak untuk melakukan kecurangan dan ketidakadilan pembagian pendapatan betul-betul akan merusak ajaran islam.²⁰

Para ulama menyatakan dalam kenyataanya banyak orang yang mempunyai kepandaian dalam usaha memproduktifkannya. Sementara itu tidak sedikit pula yang tidak memiliki harta kekayaan namun ia mempunyai kemampuan dalam memproduktifkannya. Oleh karena itu diperlukan adanya kerjasama di antara kedua belah pihak tersebut.

Ketentuan deposito dalam Fatwa DSN No.03/DSN-MUI/IV/2000 bagian kedua, sebagai berikut:²¹

Kedua : Ketentuan Umum Deposito Berdasarkan *Mudharabah*:

1. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai shahibul maal atau pemilik dana, dan bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola dana.
2. Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah dan mengembangkannya, termasuk didalamnya *mudharabah* dengan pihak lain.

¹⁹ A. Djazuli, *Fiqih Syiasah*, Jakarta: Kencana, 2006, hlm.130.

²⁰ Ahmad Rodoni dan Abdul Hamid, *Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Zikril, 2008, hlm.28.

²¹ Fatwa DSN No.03/DSN-MUI/IV/2000

3. Modal dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
4. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
5. Bank sebagai *mudharib* menutup biaya oprasional deposito dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
6. Bank tidak diperkenankan untuk mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.

DSN MUI NO: 115/DSN-MUI/IX/2017

Keenam : tentang ketentuan terkait nisbah bagi hasil.

1. Sistem/metode pembagian keuntungan harus disepakati dan dinyatakan secara jelas dalam akad.
2. Nisbah bagi hasil harus disepakati pada saat akad.
3. Nisbah bagi hasil sebagaimana angka 2 tidak boleh dalam bentuk nominal atau angka presentase dari modal usaha.
4. Nisbah bagi hasil sebagaimana angka 2 tidak boleh menggunakan angka presentase yang mengakibatkan keuntungan hanya dapat diterima oleh salah satu pihak; sementara pihak lainnya tidak berhak mendapatkan hasil usaha *mudharabah*.
5. Nisbah bagi hasil boleh diubah sesuai kesepakatan.
6. Nisbah bagi hasil boleh dinyatakan dalam bentuk multinisbah.²²

²² Fatwa DSN MUI No:15/DSN-MUI/IX/2017

Menurut Ascary, ada berapa syarat pokok *mudharabah* antara lain sebagai berikut:

1. Usaha *mudharabah*, shahibul maal boleh menentukan usaha apa yang akan dilakukan oleh mudharib, dan mudharib harus menginvestasikan modal ke dalam usaha tersebut saja. *Mudharabah* seperti ini disebut *mudharabah muqayadah* (*mudharabah* terikat). Akan tetapi apabila shahibul maal memberikan kebebasan kepada mudharib untuk melakukan usaha apa saja yang diinginkan oleh mudharib, maka kepada *mudharib* harus diberi otorisasi untuk menginvestasikan modal kedalam usaha yang dirasa cocok. *Mudharabah* seperti ini disebut *mudharabah mutlaqah* (*mudharabah* tidak terikat).
2. Pembagian keuntungan. Untuk validitas *mudharabah* diperlukan bahwa para pihak sepakat, pada awal kontrak, pada proporsi tertentu dari keuntungan nyata yang menjadi bagian masing-masing. Tidak ada proporsi tertentu yang ditetapkan oleh syari'ah, melainkan diberi kebebasan bagi mereka dengan kesepakatan bersama. Namun tidak boleh mengalokasikan keuntungan dengan tingkat presentase tertentu dari modal.²³

²³ Ascary, *Akad dan Produk bank Syariah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2007 hlm.65.

F. Langkah – Langkah Penelitian

Langkah-langkah penelitian lazim juga disebut prosedur penelitian dan ada pula yang menggunakan metodologi penelitian secara garis besar langkah – langkah penelitian ini mencakup :

1. Menentukan Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di KSPPS BMT Itqan Padasuka Bandugn yang beralamat di Jl. Padasuka no, 160 RT/02 RW/03 Kelurahan Pasir Layung, Kecamatan Cibenyng Kidul, Kotamadya Bandung.

2. Menentukan Metode Penelitian

Metode yang digunakan penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang memerlukan data berupa kata-kata tertulis, data lisan, dan perilaku yang dapat diamati. Untuk mendapatkan hal itu, penulis menggunakan metode deskriptif. Metode deskriptif adalah metode penelitian yang memberikan gambaran atau uraian atas suatu keadaan sejelas mungkin tanpa ada perlakuan terhadap objek yang diteliti.²⁴

Menurut sugiyono menyatakan bahwa metode deskriptif adalah suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas.²⁵

3. Menentukan Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

²⁴ Heri Jauhari, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2010, hlm. 34.

²⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Administrasi*, Bandung: Alfabeta, 2005, hlm. 21.

- a. Data *person*, adalah orang yang dapat memberikan data berupa jawaban lisan melalui wawancara.
- b. Data *paper*, adalah sumber data yang menyajikan tanda-tanda berupa huruf, yang dimaksud dengan huruf di sini dokumen atau tulisan yang berupa karya ilmiah, baik artikel, makalah, maupun laporan-laporan.²⁶

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara:

- a. Observasi, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti untuk melakukan pengamatan secara langsung terhadap gejala-gejala yang timbul dan penulis melakukan observasi langsung ke lokasi penelitian untuk mendapatkan gambaran secara nyata dari objek yang diteliti.
- b. Wawancara, yaitu digunakan sebagai teknik pengumpulan data dan apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan masalah yang diteliti. Adapun wawancara ini dengan melakukan tanya jawab dengan para pihak terkait.
- c. Studi Kepustakaan, yaitu digunakan untuk mencari teori-teori dan pendapat-pendapat tersebut dikembangkan dan dijabarkan sehingga satu sama lain berkesinambungan.

²⁶ Heri Jauhari, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2010, hlm. 35.

5. Analisis Data

Analisis data merupakan penguraian data melalui tahapan:

Kategorisasi dan klarifikasi, perbandingan dan pencarian hubungan antara data yang secara spesifik tentang kualitatif, seluruh data terkumpul dari data *person* dan data *paper*, dianalisis dengan pendekatan rasional. Setelah data-data yang diperlukan terkumpul, maka langkah selanjutnya mengelola dan menganalisis data tersebut. Analisis data tersebut dilakukan dengan tahapan – tahapan sebagai berikut:

- a. Mengelompokkan seluruh data dalam satuan sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian.
- b. Mengimplementasikan data yang sudah ada yang berbentuk angka – angka ke dalam penjelasan.
- c. Menghubungkan data mengenai mudharabah' dengan teori yang sudah dikemukakan dalam kerangka pemikiran.
- d. Menarik kesimpulan dari data – data yang dianalisis mengenai status hukum pelaksanaan akad *mudharabah* terhadap deposito di KSPPS BMT Itqan Padasuka Bandung.